

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun alokasi lahan potensial Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R) di Kabupaten Serang melalui pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan pelayanan persampahan, kesesuaian lahan, ketersediaan lahan, kondisi eksisting fasilitas, validasi lapangan, serta identifikasi status bidang tanah menggunakan platform BHUMI ATR/BPN. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Kondisi pengelolaan persampahan di Kabupaten Serang masih belum optimal yang ditunjukkan oleh tingginya timbulan sampah, terbatasnya cakupan pelayanan, serta minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang berfungsi. Hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar TPS 3R tidak beroperasi secara optimal sehingga diperlukan pengembangan fasilitas baru untuk meningkatkan pelayanan persampahan.
2. Berdasarkan analisis kebutuhan TPS 3R, Kabupaten Serang masih memerlukan penambahan fasilitas TPS 3R untuk mendukung pelayanan persampahan sesuai dengan jumlah penduduk dan timbulan sampah yang dihasilkan pada masing-masing kecamatan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, Kabupaten Serang memerlukan 218 unit TPS 3R. Dengan mempertimbangkan satu unit TPS 3R yang masih beroperasi, maka kebutuhan pengembangan menjadi 217 unit TPS 3R.
3. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pengembangan TPS 3R sebanyak 217 unit dengan hasil akhir penelitian yang hanya menghasilkan 13 bidang Hak Pengelolaan (HPL) sebagai alokasi lahan potensial. Kesenjangan tersebut terjadi karena meskipun terdapat 1.532 kandidat lokasi yang memenuhi kriteria teknis dan spasial, sebagian besar belum memenuhi persyaratan status bidang tanah sesuai Petunjuk Teknis TPS 3R Tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan lahan pemerintah yang memenuhi seluruh kriteria masih terbatas, sehingga diperlukan verifikasi status bidang tanah maupun mekanisme pengadaan tanah untuk mendukung pengembangan TPS 3R di Kabupaten Serang.

4. Penelitian ini menghasilkan 13 bidang Hak Pengelolaan (HPL) sebagai alokasi lahan potensial TPS 3R yang tersebar di Kecamatan Pulo Ampel. Seluruh lokasi tersebut telah memenuhi kriteria kebutuhan pelayanan persampahan, kesesuaian lahan, ketersediaan lahan, validasi lapangan, serta status bidang tanah sesuai arahan Petunjuk Teknis TPS 3R Tahun 2017.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Serang

- Menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengembangan TPS 3R di Kabupaten Serang, khususnya pada lokasi yang telah teridentifikasi berada pada bidang Hak Pengelolaan (HPL) sehingga proses penyediaan lahan dapat dilakukan dengan lebih efektif.
- Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran basis data aset tanah pemerintah melalui koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (ATR/BPN) agar informasi status bidang tanah yang digunakan dalam perencanaan pembangunan lebih akurat, mutakhir, dan memiliki kepastian hukum.
- Mengembangkan TPS 3R secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan pelayanan persampahan serta mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RTRW, RPJMD, dan Jakstrada Kabupaten Serang.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Menggunakan data status bidang tanah yang lebih rinci dan tervalidasi, seperti data aset pemerintah dari BPKAD atau data pertanahan langsung dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (ATR/BPN), sehingga proses identifikasi lokasi potensial memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan hanya menggunakan informasi dari platform BHUMI ATR/BPN.
- Mengembangkan metode penentuan lokasi TPS 3R dengan mengintegrasikan pendekatan optimasi spasial, seperti Location-Allocation, Multi Criteria Decision Analysis (MCDA), atau metode serupa, sehingga lokasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek teknis dan spasial, tetapi juga lebih optimal dari sisi jangkauan pelayanan, efisiensi operasional, dan implementasi pembangunan.